

Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Tionghoa di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 1968-1998

Nur Laeli Kusumawardani¹, Arifin Suryo Nugroho², Sumiyatun Septianigsih³
^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v24i.1641](https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1641)

Submitted:

June 14, 2025

Accepted:

July 06, 2025

Published:

July 23, 2025

Keywords:

Komunitas Tionghoa,
Gombong, Dinamika Sosial
Ekonomi

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji dinamika sosial dan ekonomi komunitas Tionghoa di Gombong, sebuah kawasan di Kabupaten Kebumen yang memiliki sejarah panjang sebagai daerah dengan kehidupan pecinan yang khas. Kehidupan komunitas Tionghoa di wilayah ini menunjukkan adanya interaksi yang erat dengan masyarakat lokal maupun pengaruh budaya Eropa dan tetap berjalan harmonis meskipun terjadi berbagai gejala politik dan ekonomi di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan awal komunitas Tionghoa di Gombong sebelum masa Orde Baru, serta menganalisis kondisi sosial dan ekonomi mereka selama periode 1968–1998. Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis, yang meliputi tahapan heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pendekatan snowball sampling guna menggali informasi secara mendalam dari para narasumber yang mengetahui sejarah komunitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukan sumber yang secara pasti mencatat tahun kedatangan komunitas Tionghoa ke Gombong. Namun, sebagian besar dari mereka diketahui berasal dari Provinsi Fujian, Tiongkok. Selama masa Orde Baru, komunitas ini mampu mempertahankan kehidupan sosial dan ekonomi yang stabil dan harmonis bersama masyarakat lokal. Meski demikian, mereka tetap menghadapi berbagai pembatasan dari kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan budaya dan administrasi yang membatasi ekspresi identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Tionghoa di Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:**Nur Laeli Kusumawardani**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: nurlaelikusumawardani62@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa merupakan salah satu ragam etnis yang melengkapi kekayaan dan turut mewarnai sejarah Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, migrasi Tionghoa ke wilayah Asia Tenggara telah terjadi selama berabad-abad yang lalu, tepatnya pada masa Dinasti Han sekitar 206 SM-220 M (Darini, 2008: 5). Indonesia menjadi salah satu negara tujuan etnis Tionghoa untuk menjalankan misi eksplorasi hingga berdagang dan tinggal menetap. Hidup sebagai pendatang tidak serta merta kehidupan komunitas Tionghoa dapat berjalan dengan mudah. Berdasarkan pendapat Didi Kwartanada dalam pengantar buku Peter Carey (2008), kedudukan komunitas

Tionghoa sebagai minoritas perantara dengan ekonominya yang cukup mapan, menyebabkan komunitas Tionghoa berada pada posisi yang rentan. Komunitas Tionghoa seringkali menjadi kambing hitam ketika terjadi ketegangan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut muncul berkali-kali dalam periode sejarah Indonesia dari masa kolonialisme hingga masa Orde Baru, bahkan ada beberapa peristiwa kerusuhan lokal terjadi juga pada masa Reformasi.

Sudah sejak lama komunitas Tionghoa mendiami wilayah Nusantara dan turut serta memberikan warna dalam sejarah Indonesia. Mereka telah lama menetap di wilayah Nusantara dan membentuk suatu daerah yang mayoritas berdarah Tionghoa atau yang dikenal dengan sebutan pecinan. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang menjadi bukti terjadinya interaksi antara keturunan Tionghoa dan masyarakat lokal, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Gombang menjadi salah satu wilayah di Kebumen, Jawa Tengah yang memiliki corak kehidupan pecinan di dalamnya, bahkan hal itu masih bisa disaksikan hingga kini. Keberadaan Benteng Van Der Wijck, Klenteng Hok Tek Bio Gombang, Pasar Wonokriyo, dan perumahan di Jalan Sempor Lama menjadi bukti kehidupan dan interaksi yang kuat antara masyarakat lokal, komunitas Tionghoa dan bangsa Eropa. Meskipun Gombang dikenal sebagai daerah unik dengan banyaknya keturunan Tionghoa di dalamnya, pada kenyataannya hubungan relasi sosial ekonomi antara komunitas Tionghoa dengan masyarakat lokal dapat terjalin dengan baik meski di tengah gejolak ekonomi dan politik.

Melihat fenomena tersebut, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam dan tercetuslah judul penelitian yaitu "Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Tionghoa di Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Tahun 1968-1998" sebagai bahan kajian penulis.

1.1 Komunitas Tionghoa di Indonesia

Komunitas merupakan kesatuan sosial yang menetap di suatu wilayah dan terikat oleh rasa identitas yang sama, sehingga interaksi yang terjalin sesuai dengan adat istiadat (Koentjaraningrat et al., 1979: 98). Sementara itu, sosiolog asal Prancis yang bernama Emile Durkheim menjelaskan dalam Burke (2001: 83) bahwa istilah komunitas digunakan untuk menyebut solidaritas sosial yang terbentuk secara spontan dan tidak terstruktur. Emile juga memberikan contoh konkretnya yaitu kaum Fransiskan yang memiliki latar keagamaan yang sama. Komunitas juga dapat diartikan sebagai persekutuan manusia yang terjalin secara permanen dan memiliki tujuan tertentu sebagai target capaian (Arifin, 2015: 15). Berdasarkan beberapa pengertian yang ada, maka disimpulkan bahwa komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki kesamaan karakteristik dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Komunitas menjadi wadah untuk hidup bersama dan saling berinteraksi satu sama lain.

Sementara itu, orang Tionghoa di sini merujuk pada keturunan etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Secara umum, orang Tionghoa Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari Indonesia, namun tetap mempertahankan budaya dan tradisi Tionghoa dalam kehidupannya. Apabila dilihat dari ciri fisiknya, orang Tionghoa sangat mudah dikenali. Memiliki mata sipit dengan warna kulit yang lebih kuning dan bentuk tubuh yang pendek, menjadi ciri fisik yang umumnya dimiliki oleh keturunan Tionghoa (Noordjanah, 2010: 2). Jadi dapat disimpulkan bahwa Tionghoa adalah sebutan bagi mereka yang memiliki darah, budaya, dan sejarah dengan Cina. Keberadaan Tionghoa dalam kenyataan sosial di Indonesia seringkali dipisahkan oleh garis pemisah antara mereka dan kelompok etnis lainnya. Hal ini sangat terlihat ketika mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap orang Tionghoa adalah pendatang yang memiliki kultur berbeda meskipun mereka telah diakui sebagai bagian dari keragaman etnis di Indonesia.

Orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia telah lama dikenal senang hidup secara berkelompok-kelompok di suatu daerah. Pemukiman-pemukiman yang dihuni oleh mayoritas orang keturunan Tionghoa banyak ditemukan di berbagai kota Indonesia. Kawasan tinggal mereka identik dengan kawasan eksklusif yang dekat dengan pusat perdagangan (Coppel, 1994: 24). Kawasan tempat tinggal mereka juga kental akan tradisi dan budaya negeri leluhur atau yang kita kenal sebagai Chinatown.

Berdasarkan uraian di atas maka komunitas Tionghoa merujuk pada sekelompok orang yang memiliki darah atau keturunan dari Tiongkok dan biasanya hidup bersama dalam suatu wilayah. Mereka memiliki ikatan sosial, nilai, budaya, identitas dan kepentingan bersama. Komunitas Tionghoa biasanya tetap menjaga tradisi dan budaya leluhur dalam kehidupannya. Meskipun begitu, seiring waktu mereka juga beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya dimana mereka tinggal. Hal itulah yang memunculkan corak baru akibat adanya akulturasi antara kebudayaan Tiongkok dengan kebudayaan lokal Indonesia. Akulturasi ini menjadi cerminan dari sejarah panjang interaksi Tionghoa dengan masyarakat lokal dan menjadi bagian penting dari keberagaman Indonesia.

1.2 Dinamika Ekonomi

Dinamika merupakan suatu proses atau gerak yang menjadi awal terjadinya perubahan dalam masyarakat (Koentjaraningrat et al., 1979: 33). Dinamika juga dapat diartikan sebagai tahapan untuk tumbuh, berkembang dan berubahnya suatu sistem terikat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dinamika menjadi pola gerakan yang timbul dari faktor internal maupun eksternal (Kementerian Pertahanan, 2020). Selain itu, berdasarkan

pendapat Slamet Santoso yang dikutip dalam Setyawan (2020: 4), dinamika memiliki arti hubungan timbal balik dari adanya tingkah laku suatu individu yang turut mempengaruhi individu lainnya. Hal itu menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan antara satu individu dengan keseluruhan kelompoknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dinamika adalah konsep yang menggambarkan terjadinya gerak dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam suatu sistem, baik itu fisik, kehidupan sosial, ekonomi dan lainnya. Dinamika menjadi mata rantai yang tidak terputus karena ketika satu komponen mengalami perubahan maka akan membawa perubahan pada komponen lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa dinamika menjadi sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Sementara itu, ekonomi memiliki arti sebagai upaya pengelolaan pendapatan dan perbelanjaan atau pengeluaran. Ekonomi menjadi suatu sistem dalam masyarakat untuk menentukan sumber-sumber yang dinilai memberikan keuntungan melalui kegiatan produksi, distribusi dan perdagangan (Koentjaraningrat et al., 1979: 39). Apa pula konsep ekonomi menurut Adam Smith yang dikutip dalam Ramlawati et al., (2022: 9) yaitu ekonomi merupakan cabang ilmu yang digunakan untuk mempelajari pengelolaan kekayaan suatu bangsa dengan melihat potensi seperti hasil industri, pertanian dan lainnya. Ekonomi juga menjadi upaya seseorang untuk menghasilkan dan menukar barang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dari upaya tersebut, nantinya dapat menghasilkan manfaat maupun peningkatan kesejahteraan bersama.

Adapun pendapat lain dari Hermawan Kertajaya yang dijelaskan dalam Ramlawati et al., (2022: 9) yaitu ekonomi bukan hanya tentang uang dan barang, namun lebih pada cara bagaimana perusahaan dan konsumen saling berhubungan. Ekonomi dipandang sebagai strategi bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan pola perubahan kebutuhan konsumen. Hal itu menjadi cara menciptakan produk barang ataupun jasa yang memiliki daya beli tinggi. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah kegiatan menciptakan produk barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan.

Ekonomi menjadi ilmu yang empiris dengan mempelajari cara bagaimana manusia dapat mencapai kesejahteraan. Selama masa kolonial di Indonesia, kapital asing dengan didukung organisasi yang rapi telah lama menguasai perekonomian Indonesia. Mereka juga menggunakan orang Asia seperti komunitas Tionghoa sebagai kaki tangannya. Hal itu membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sulit diperbaiki. Bahkan setelah 20 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih banyak menghadapi tantangan dan kekacauan ekonomi. Perbaikan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan baru terjadi pada masa Orde Baru, dimana ekonomi Indonesia dibangun dengan menganut sistem ekonomi Pancasila (Widjaja, 1985: 45-61).

Dinamika ekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang berfokus untuk mengetahui fenomena ekonomi seperti siklus bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan isu-isu terkait dari waktu ke waktu (Sasaki, 2022: 159). Apabila dijelaskan secara lebih sederhana, maka dinamika ekonomi adalah segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu pada perekonomian suatu negara. Dinamika ekonomi juga menggambarkan bagaimana perekonomian suatu negara dapat berubah karena adanya faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah dan situasi global.

1.3 Dinamika Sosial

Dinamika sosial merupakan proses gerak yang terus-menerus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat et al., 1979: 33). Dinamika sosial dan perubahan sosial menjadi konsep yang saling berkaitan. Perubahan sosial merupakan produk dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat akibat proses interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan sosial yang meliputi hubungan timbal balik antarindividu, antarkelompok masyarakat, maupun individu dengan kelompok yang terjalin secara dinamis. Interaksi sosial memiliki beberapa bentuk seperti, kerja sama, akomodasi, persaingan dan pertikaian (Herimanto, 2010: 52).

Sederhananya adalah dinamika sosial merupakan proses perubahan yang terus berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial yang dinamis. Proses ini mencakup hubungan timbal balik antar individu dan kelompok, yang dapat berbentuk kerja sama, akomodasi, persaingan, atau pertikaian. Dinamika sosial berkaitan erat dengan perubahan sosial, karena perubahan tersebut merupakan hasil dari interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat akan berlangsung secara aktif, terus-menerus, dan responsif terhadap berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, politik, serta adanya interaksi sosial.

2. SEJARAH KEDATANGAN KOMUNITAS TIONGHOA KE GOMBONG DAN KEHIDUPANNYA SEBELUM ORDE BARU

Gombang merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan sejarahnya, Gombang merupakan daerah yang masuk dalam wilayah Bagelen. Bagelen sendiri merupakan daerah mancanegara dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerapkan sistem baru pada wilayah yang berhasil dikuasai secara penuh dengan menjadikan Bagelen sebagai daerah Karesidenan. Sejak

itulah Bagelen secara resmi menjadi wilayah Karesidenan yang terdiri dari afdeeling Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Ambal, dan Ledok. Hingga sampai pada 1 Agustus 1901 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan keputusan resmi mengenai penghapusan dan penggabungan Karesidenan Bagelen menjadi bagian dari Karesidenan Kedu (Ittihadiyah, 2012: 231).

Pada masa kolonialisme Belanda, pihak pemerintah kolonial mengarahkan orang-orang Tionghoa untuk tinggal di perkampungan yang tidak jauh dari pusat perdagangan. Saat itu, pemerintah kolonial juga menerapkan sistem pecinan, yaitu pengelompokan orang Tionghoa dalam satu komunitas yang terpisah dari masyarakat lokal (Daradjadi, 2017: 22). Kebumen menjadi daerah di Jawa Tengah yang tidak luput dari hadirnya komunitas Tionghoa dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini angka tahun datangnya komunitas Tionghoa di Kebumen belum dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi, keberadaan makam kuno Tionghoa dengan nama Tan Peng Nio di desa Kalijerek menjadi bukti bahwa orang berdarah Tionghoa telah mendiami Kebumen sejak sekitar tahun 1750. Tan Peng Nio merupakan istri kedua dari Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kolopaking III atau Bupati Kebumen yang menjabat dari tahun 1751-1809, namun saat itu Kebumen lebih dikenal dengan nama Panjer (Hindarto, 2020: 86).

Di sisi lain, kehadiran orang Tionghoa ke Gombang yang notabene berada di wilayah Bagelen Barat diperkirakan terjadi setelah Perang Diponegoro atau sejak 1830an. Hal tersebut didasarkan pada data yang didapatkan dari beberapa keluarga Tionghoa di Gombang (Asmodiwongso, 2020: 52). Meskipun begitu, hingga saat ini belum ditemukan informasi pasti mengenai spesifik tahun kedatangan komunitas Tionghoa ke Gombang. Beberapa kisah atau narasi sejarah memang sempat muncul dan berpotensi untuk diteliti lebih lanjut, namun akses terhadap sumber-sumber tersebut masih sangat terbatas (Alona, wawancara pribadi, 20 Juni 2025). Selain itu, ada sebuah penemuan yang belum terpublikasi dan masih tersimpan di museum Ronggowarsito, Semarang. Penemuan itu berupa sebuah bongpay atau batu nisan dalam tradisi Tionghoa yang ditemukan di daerah yang cukup dekat dengan Gombang yaitu Kecamatan Rowokele. Dari bongpay yang ditemukan di dapat informasi bahwa nisan tersebut berangka tahun 1798. Akan tetapi, bongpay yang ditemukan masih perlu diteliti kembali, karena ada aksara dan sistem pertanggalan yang tidak mudah untuk dibaca sehingga membutuhkan keahlian khusus. Penemuan ini tentu dapat menjadi petunjuk bahwa komunitas Tionghoa telah ada di sekitar Gombang jauh sebelum Perang Diponegoro meski aktivitasnya belum signifikan. Baru setelah tahun 1850, komunitas Tionghoa di Gombang mulai menguat aktivitasnya di bidang ekonomi (Hindarto, wawancara pribadi, 19 Juni 2025).

Pasca Perang Diponegoro, pemerintah kolonial melihat adanya potensi Bagelen yang rawan akan pemberontakan sekaligus sebagai lumbung pangan. Hal itu mendorong pemerintah kolonial membangun pos militer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang logistik yang dihimpun dari kawasan Bagelen Barat dan Banyumas Timur. Melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang cukup lama, pos militer tersebut dibangun menjadi lebih permanen dan dikenal sebagai Fort Cochius (Asmodiwongso, 2020: 43-46). Keberadaan Fort Cochius sebagai pusat kegiatan militer tentu sangat berpengaruh pada hadirnya kaum pedagang berdarah Tionghoa. Secara perlahan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan muncul kawasan pemukiman baru yang banyak dihuni oleh pedagang Tionghoa. Kawasan tersebut menjadi tempat bagi komunitas Tionghoa untuk mengaktifkan kegiatan perdagangan di sekitar Fort Cochius (Asmodiwongso, 2020: 51). Daerah sekitar Fort Cochius menjadi lokasi yang aman dan strategis bagi komunitas Tionghoa untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini tentu tidak lepas dari hubungan timbal balik antara pemerintah kolonial dengan komunitas Tionghoa yang telah lama dikenal sebagai mitra dagang. Adanya hubungan yang erat dalam bidang bisnis itulah yang menjadikan Gombang memiliki daya tarik bagi komunitas Tionghoa untuk datang. Rumah-rumah bercorak Tionghoa klasik, bangunan bekas sekolah khusus Tionghoa dan pabrik menjadi bukti daya tarik Gombang bagi komunitas Tionghoa (Hindarto, 2015).

Dibangunnya Fort Cochius atau Benteng Van der Wijck sebagai benteng logistik tentu memberikan peluang kepada komunitas Tionghoa yang datang ke Gombang. Komunitas Tionghoa turut serta berperan penting dalam mengaktifkan gairah kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perdagangan. Melalui kemampuannya dalam berdagang, komunitas Tionghoa mampu memanfaatkan keadaan sehingga mereka sukses menjadi jembatan penghubung antara pos militer yang membutuhkan logistik dengan masyarakat petani dan peternak. Hubungan yang tercipta saat itu menjadi sebuah jaringan ekonomi yang saling menguntungkan dan menjadikan adanya pertemuan antar budaya di tengah realita kehidupan pada masa itu. Komunitas Tionghoa yang telah membaur dalam kehidupan sehari-hari melalui perdagangan, membuat mereka turut serta menjadi bagian dari dinamika sosial ekonomi di kawasan Gombang.

Aktivitas ekonomi Gombang semakin meningkat saat Benteng Van der Wijck beralih fungsi menjadi *Pupillen School*. *Pupillen School* merupakan sekolah calon anggota militer KNIL yang memiliki darah campuran Eropa-Asia (Asmodiwongso, 2020: 97). Perubahan fungsi benteng kala itu tentu mendorong peningkatan kebutuhan logistik, sehingga komunitas Tionghoa memainkan perannya sebagai penyedia barang logistik yang siap untuk menyuplai kebutuhan *Pupillen School*. Relasi semacam itu dapat dilihat dari seorang pedagang sukses Tionghoa bernama Liem Siau Lam yang menyuplai susu dan daging untuk instansi militer di Benteng Van der

Wijck. Keberadaan *Pupillen School* sukses membuat Gombang menjadi daerah yang lebih ramai pada masa itu, sehingga muncul warung dan toko-toko baru milik kalangan pedagang Tionghoa (Asmodiwingso, 2020: 59).

Komunitas Tionghoa yang telah lama menetap di Gombang mayoritas berasal dari pesisir selatan Tiongkok, tepatnya adalah Provinsi Fujian. Mereka berasal dari daerah pesisir Fujian yang meliputi daerah-daerah seperti Xiamen, Fuqing, Putian dan Quanzhou. Setelah ekonomi mereka menguat, muncul tokoh penting seperti Liam Siaw Lam yang memiliki beberapa usaha seperti susu perah, kopra, dan sarang burung walet di Karangbolong (Alona, wawancara pribadi, 20 Juni 2025). Selain mereka yang datang langsung dari negeri Tiongkok, ada juga komunitas Tionghoa yang datang dari wilayah sekitar Gombang. Setelah Gombang berkembang menjadi kota niaga, pedagang Tionghoa terus berdatangan dari daerah sekitar Gombang seperti Klaten, Jogja, Kutoarjo, dan Cilacap. Mereka datang sebagai perantau dan mulai ikut membangun bisnis di daerah kecil ini.

3. KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KOMUNITAS TIONGHOA GOMBONG MASA ORDE BARU (1968-1998)

Masa Orde Baru dimulai ketika Soeharto menggantikan Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Surat perintah ini dikeluarkan Presiden Soekarno sebagai respon dari gejolak politik akibat peristiwa G30S 1965. Penunjukan Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden dikenal sebagai masa transisi kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Kemudian, dalam Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968 secara resmi Soeharto dilantik sebagai presiden Indonesia, hal itu menjadi tanda berakhirnya masa transisi dan dimulainya era Orde Baru. Era ini menjadi babak baru dalam sejarah politik di Indonesia (Permana, 2018:8). Meski Orde Baru dianggap berhasil dalam proses mewujudkan cita-cita bangsa, namun dibalik itu terdapat catatan kelam masa Orde Baru dalam hal diskriminasi komunitas Tionghoa.

Praktik diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, pihak pemerintah kolonial membagi masyarakat dalam tiga golongan yaitu Eropa, Timur Asing dan pribumi atau masyarakat lokal. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan posisi masyarakat lokal jauh tertinggal, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sementara komunitas Tionghoa yang masuk dalam golongan Timur Asing digambarkan sebagai komunitas yang eksklusif di bidang ekonomi. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya persepsi negatif dari masyarakat lokal terhadap komunitas Tionghoa dan berujung pada perilaku diskriminatif. Meski hal itu dapat mereda ketika peristiwa Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan, namun rezim Orde Baru seolah menumbuhkan kembali sikap diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Secara sistematis Orde Baru telah membatasi dan menekan komunitas Tionghoa melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai mengucilkan komunitas Tionghoa di Indonesia (Winarta, 2004: 48-50).

Pada masa Orde Baru, komunitas Tionghoa bukan hanya mengalami diskriminasi pada bidang ekonomi saja, tetapi juga politik dan budaya. Pemerintah Orde Baru menginginkan adanya kesatuan nasional versi Orde Baru, melalui asimilasi atau meleburkan identitas Tionghoa ke dalam budaya nasional. Asimilasi ini menyebabkan adanya penekanan komunitas Tionghoa dalam mengekspresikan identitas mereka agar terlihat seperti pribumi atau masyarakat lokal. Lebih dari 30 tahun komunitas Tionghoa mengalami diskriminasi tersebut. Hal itu terbukti dari kebijakan-kebijakan bercorak diskriminatif yang diantaranya yaitu:

Pada tahun 1967 Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 14/1967 yang membatasi kegiatan peribadatan Tionghoa, termasuk larangan perayaan Imlek di Indonesia.

- a. Tahun 1967 juga muncul surat edaran No. 06/Prekab/6/67 yang menyatakan komunitas Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia.
- b. Tahun 1978 keluar Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/KP/XXII/1978, yang berisi mengenai larangan penggunaan bahasa Cina.
- c. Pada tahun 1988 keluar surat edaran SE.02/SE/Ditjen?PPG/K/988 yang berisi larangan penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum.
- d. Tahun 1988 juga lahir Peraturan Menteri Perumahan No. 455.2-360/1988 yang melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui klenteng.
- e. Pada tahun 1996 keluar Keputusan Presiden No. 56 yang menyatakan bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) tidak lagi berlaku (Tempo, 2004: 39-40).

Menilik bagaimana pemerintah Orde Baru menciptakan suasana yang tidak ramah bagi komunitas Tionghoa di Indonesia, dimana diskriminasi bukan hanya datang dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat lokal karena adanya kecemburuan sosial. Akan tetapi, fenomena tersebut agaknya berbeda dengan kisah komunitas Tionghoa di Gombang. Kota kecil di Kabupaten Kebumen ini memperlihatkan realitas sosial yang sedikit berbeda. Meski kebijakan pemerintah saat itu bersifat menekan, namun relasi sosial di tingkat lokal ternyata bisa lebih luwes. Gombang bukan hanya menjadi tempat yang aman bagi komunitas Tionghoa untuk tinggal, tetapi juga untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat lokalnya.

Keharmonisan yang tercipta di Gombong tentu tidak terlepas dari hasil interaksi sosial yang terjalin sejak lama. Sejak zaman kolonial, komunitas Tionghoa telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial ekonomi Gombong. Banyak dari komunitas Tionghoa Gombong yang membuka toko dan pabrik kecil yang justru menghidupkan denyut kota kecil ini dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Hubungan ekonomi yang saling menguntungkan ini memperkuat ikatan sosial antara komunitas Tionghoa dengan masyarakat lokal. Masyarakat di daerah kecil seperti Gombong juga cenderung lebih mengenal satu sama lain secara personal. Penilaian terhadap individu, lebih didasarkan pada peranannya dalam masyarakat, bukan semata ditentukan dari latar belakang etnisnya. Berbeda dengan kota-kota besar, dimana prasangka terhadap komunitas Tionghoa lebih mudah berkembang akibat adanya jarak sosial yang tinggi. Hubungan sosial yang dibangun atas dasar saling mengenal, saling membutuhkan, dan saling menghormati terbukti mampu menciptakan ruang yang lebih aman dan inklusif bagi komunitas Tionghoa.

Meski Gombong menjadi tempat aman bagi komunitas Tionghoa dari segi hubungan sosial dengan masyarakat lokalnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa komunitas Tionghoa Gombong masih harus menghadapi kebijakan diskriminatif dari pemerintah saat itu. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan diskriminatif tersebut adalah wajib memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi seluruh warga keturunan Tionghoa, bahkan bagi mereka yang lahir dan besar di Indonesia. Hal itu tentu saja menciptakan ketimpangan mengenai status kewarganegaraan yang seolah-olah posisi komunitas Tionghoa sebagai warga negara perlu dibuktikan ulang agar diakui sebagai WNI. Selain itu, dalam praktik di lapangan tidak semua komunitas Tionghoa memiliki kemudahan akses dalam mengurus SBKRI. Banyak dari mereka yang dihadapkan dengan proses yang sulit, mahal dan berbelit-belit. Komunitas Tionghoa Gombong yang mayoritas adalah pedagang juga sering dihadapkan dengan sulitnya mengurus surat izin usaha. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi administratif yang mencolok pada komunitas Tionghoa (Hariono, wawancara pribadi, 26 Januari 2025).

Selain kesulitan dalam hal administrasi, komunitas Tionghoa di Gombong juga dihadapkan dengan adanya pembatasan dan larangan perayaan budaya Tionghoa di muka umum. Kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari komunitas Tionghoa Gombong, terutama dalam hal pelestarian bahasa, tradisi, dan kegiatan keagamaan. Bentuk pembatasan budaya yang paling dirasakan saat itu adalah pelarangan tahun baru Imlek secara terbuka. Perayaan Imlek hanya dapat dilakukan secara tertutup dan sederhana di lingkungan rumah tangga masing-masing tanpa adanya kemeriahan pertunjukan Barongsai. Selain itu, adanya larangan pelestarian bahasa Tionghoa membuat banyak anak-anak keturunan Tionghoa Gombong yang belajar bahasa Mandarin secara sembunyi-sembunyi. Meski mengalami pembatasan kebudayaan, Klenteng Hok Tek Bio Gombong masih menjadi tempat yang relatif aman bagi komunitas Tionghoa untuk menjalankan aktivitas keagamaannya. Klenteng Hok Tek Bio masih berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual, walaupun hanya sebatas sembahyang dan doa-doa pribadi, sedangkan untuk perayaan besar seperti Imlek, Cap Go Meh, Barongsai, dan kirab patung dewa yang menjadi bagian penting dari tradisi Tionghoa dilarang dilakukan. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan masa Orde Baru telah menekan komunitas Tionghoa dalam mengekspresikan budayanya (Franciska, wawancara pribadi, 28 Mei 2025).

Pedagang kalangan Tionghoa umumnya menempati bangunan yang memiliki keseragaman bentuk di kawasan pecinan. Biasanya terdiri dari dua atau tiga lantai, dibangun berderet memanjang dan berhimpitan satu sama lain. Lantai dua atau tiga biasanya digunakan sebagai rumah tinggal sedangkan lantai satu biasanya digunakan sebagai tempat usaha. Tipe bangunan semacam itu sering dikenal dengan nama ruko atau rumah toko. Keadaan ini membuka peluang besar terjadinya sosialisasi mengenai dunia dagang dari orangtua kepada anggota keluarga yang lebih muda. Proses yang berulang sepanjang hari dan intensif memberikan kesempatan bagi pemuda Tionghoa belajar secara langsung, sekaligus sebagai kontrol tingkah laku mereka. Maka tidak heran jika komunitas Tionghoa dikenal secara turun-temurun sebagai pandai dagang (Sulaiman, et al., 1988: 23). Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ciri khas bangunan pedagang Tionghoa yang tampaknya sedikit berbeda dengan bangunan yang ada di Gombong. Secara umum komunitas Tionghoa Gombong memiliki keragaman tipologi bangunan yang mereka tempati sebagai basis kegiatan ekonomi. Selain banyaknya bangunan ruko berlantai dua atau tiga, banyak juga pedagang Tionghoa di kota ini yang memiliki bangunan satu lantai. Bagian depan difungsikan sebagai tempat usaha sedangkan bagian belakang rumah dimanfaatkan sebagai area tempat tinggal. Adanya variasi tipologi pada bangunan pecinan Gombong dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, ketersediaan lahan, kemampuan ekonomi, dan tata ruang kota yang tidak sepadat kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang.

Pada masa kolonial, Gombong memiliki status sebagai kewedanan dan setelahnya menjadi kecamatan di wilayah kota yang relatif kecil. Status administratif dan skala ekonomi Gombong tentu memengaruhi karakteristik serta bentuk arsitektur bangunan yang berkembang di wilayah tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang yang sejak masa kolonial telah memiliki perekonomian berskala besar dan lebih dinamis, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan arsitekturnya. Meskipun Gombong menunjukkan dinamika ekonomi yang relatif lebih aktif dibandingkan Kebumen Kota,

statusnya sebagai kecamatan di kota kecil tetap membedakannya dari kota-kota besar, baik dari segi kapasitas ekonomi maupun ekspresi arsitektur yang dihasilkan (Hindarto, wawancara pribadi, 19 Juni 2025).

Fenomena variasi tipologi bangunan di kawasan pecinan Gombang tampaknya juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan pemerintah kolonial dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Di daerah seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang terdapat intervensi pemerintah kolonial yang cukup signifikan. Hal itu tercermin dari bentuk arsitektur bangunannya yang mirip dengan row houses di Belanda. Bangunan-bangunan di wilayah tersebut umumnya mendapat pengaruh gaya arsitektur Belanda yang berderet memanjang dan bertingkat tinggi untuk menyesuaikan lahan yang terbatas. Sementara itu, Gombang menunjukkan keragaman arsitektural yang lebih luas, hal ini dapat disebabkan oleh kondisi lahan yang relatif longgar dan tidak terlalu terikat dengan regulasi ketat pemerintah kolonial. Secara umum, arsitektur kawasan pecinan Gombang dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe utama yaitu bangunan bergaya *Holland Spreken* dan bangunan khas budaya Tionghoa. Rumah Martha Tilaar menjadi contoh representatif bangunan bercorak indisch namun bergaya bebas atau *freestyle* karena tidak memiliki pakemnya rumah indisch. Sementara untuk arsitektur bergaya Tionghoa ditandai oleh bentuk rumah yang menyerupai gudang dengan pintu utama di tengah dan meja sembahyang akan langsung terlihat saat pintu dibuka. Kedua gaya inilah yang paling menonjol dan populer di wilayah Gombang pasca masa kolonial dan menjadikan kawasan pecinan memiliki variasi tipologi bangunan (Alona, wawancara pribadi, 20 Juni 2025).

Keberadaan kawasan pecinan di pusat ekonomi Gombang mencerminkan bahwa Komunitas Tionghoa telah memainkan peran penting dalam menghidupkan aktivitas ekonomi lokal melalui pembangunan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah. Peran ini tampak jelas pada persebaran aktivitas ekonomi yang fokus di jalur-jalur strategis kota yaitu, Jalan Yos Sudarso, Jalan Puring, dan Jalan Sempor Lama. Ketiga jalur tersebut merupakan daerah strategis di mana, Jalan Yos Sudarso dikenal sebagai poros utama lalu lintas antar kota sedangkan Jalan Puring dan Jalan Sempor Lama merupakan akses vital yang menghubungkan kawasan hinterland sebagai pemasok bahan baku ke wilayah Gombang sebagai pusat ekonomi. Komunitas Tionghoa Gombang secara cermat memanfaatkan letak geografis ini untuk mengembangkan berbagai jenis usaha. Keberadaan mereka di kawasan strategis Gombang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Pada masa Orde Baru, komunitas Tionghoa di Gombang masih dikenal aktif dalam berbagai jenis usaha yang menopang perekonomian lokal. Banyak dari mereka yang menjalankan berbagai jenis usaha seperti sektor penyedia kebutuhan pokok, kebutuhan non pokok dan sektor pelayanan atau jasa. Untuk sektor penyedia kebutuhan pokok, mereka banyak terlibat dalam perdagangan sembako melalui toko kelontong dan grosir. Kemudian, jenis usaha barang non pokok yang digeluti meliputi toko pakaian, alat tulis kantor, toko bangunan, peralatan rumah tangga, hingga elektronik. Sementara di bidang pelayanan dan jasa, mereka menjalankan usaha bengkel, salon, penjahit, pengobatan herbal, penginapan dan kontraktor.

Jenis usaha yang dijalankan komunitas Tionghoa di Gombang pada umumnya tergolong dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro dan kecil banyak dijumpai dalam bentuk rumah toko, warung, dan lapak pasar. Sementara usaha menengah berupa pabrik kecil, hotel, dan emporium atau toko besar yang menyediakan berbagai barang mewah seperti elektronik. Peran UMKM Tionghoa ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal Gombang, tetapi juga menunjukkan ketangguhan dan adaptasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa Orde Baru.

4. SIMPULAN

Suatu peristiwa sosial tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kondisi satu atau dua tahun terakhir. Masyarakat merupakan hasil konstruksi historis, sehingga penting untuk meninjau masa lalu guna memahami mengapa fenomena itu terjadi. Misalnya masyarakat Gombang cenderung lebih egaliter dibandingkan dengan Kebumen. Secara historis, Gombang tumbuh sebagai wilayah dengan orientasi perdagangan, berbeda dengan Kebumen yang lebih bercorak aristokratis dan berakar pada struktur kekuasaan kerajaan Mataram Kuno, sebagaimana terlihat dari keberadaan alun-alun, pusat pemerintahan, dan simbol-simbol kekuasaan lainnya.

Sebaliknya, Gombang tidak memiliki struktur simbolik semacam itu. Interaksi sosial di wilayah ini lebih terbentuk secara alami dan horizontal, dengan kepentingan utama yang bersifat ekonomis, setara dan berbasis pada aktivitas mencari penghidupan. Kedatangan Belanda ke Gombang didorong oleh kekhawatiran terhadap potensi pemberontakan di wilayah tersebut. Pembangunan benteng sebagai respons terhadap kekhawatiran ini menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru, karena Belanda sebagai kekuatan kolonial menguasai sumber daya keuangan.

Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pendatang dari berbagai latar belakang etnis seperti Arab, Tionghoa, Kalang, bahkan Yahudi, yang melihat peluang untuk mengembangkan usaha di sekitar benteng. Hal ini pada akhirnya membentuk suatu ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkembang ke wilayah-wilayah sekitarnya.

Kondisi sosial Gombang yang relatif lebih cair bahkan setelah peristiwa besar seperti prahara 1965 dan krisis 1998 dapat ditelusuri ke hubungan ekonomi yang telah terbangun sejak masa kolonial. Hubungan tersebut

menciptakan simbiosis mutualisme antara komunitas Tionghoa dengan masyarakat lokal dan menciptakan relasi sosial yang kuat, sehingga ketika terjadi ketegangan politik nasional yang berdampak pada etnis Tionghoa di banyak daerah, komunitas Tionghoa di Gombong tetap terlindungi dan bahkan mengalami solidaritas sosial dari warga setempat.

REFERENSI

- Arifin, Bambang Syamsul. 2015. *Dinamika Kelompok*. Bandung: CV Pustaka Setia. Tersedia dari <https://etheses.uinsgd.ac.id>.
- Asmodiwongso, Sigit dan Salma Nusiana. 2020. *Ngomong Gombong: Remah Sejarah Kota 1840-1942*. Kebumen: Yayasan Tali Pakarti Nusantara.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Carey, Peter. 2008. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Daradjadi. 2017. *Geger Pecinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta: Buku Kompas. Tersedia dari iPusnas.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Tersedia dari <https://pdfcoffee.com>.
- Harnoko dan Poliman. 1986. *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tersedia dari <https://respositori.kemdikbud.go.id>.
- Herimanto dan Winarno. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hindarto, Teguh. 2020. *Bukan Kota Tanpa Masa Lalu: Dinamika Sosial Ekonomi Kebumen Era Arung Binang VII*. Jogjakarta: Deepublish. Tersedia dari iPusnas
- Hindarto, Teguh. 2021. *Wetan Kali Kulon Kali: Mengenang Kabupaten Karanganyar Hingga Penggabungan dengan Kabupaten Kebumen*. Jogjakarta: Deepublish.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pertahanan RI. 2020. *Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. Tersedia dari <https://www.kemhan.go.id>.
- Koentjaraningrat., Budhisantoso., Danandjaya., Suparlan, P., Masinambow., & Sofion. (1979). *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tersedia dari <https://respositori.kemdikbud.go.id>.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Naqiyah, Najlatun. 2017. *Konseling Komunitas*. Malang: Media Nusa Creative Publishing. Tersedia dari iPusnas.
- Noordjanah, Andjarwati. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Permana, Hendra. 2018. *Orede Baru*. Pontianak: Derwati Press.
- Priyadi, Sugeng. 2021. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyadi, Sugeng. 2021. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawan, David Ari. 2022. *Dinamika Kelompok dalam Bimbingan dan Konseling*. Kudus: CV Al Qalam Media Lestari. Tersedia dari <http://repository.iainkudus.ac.id>.
- Sulaiman, I., Ismail, E., Ahok, P., As'ad, M., & Majid. (1988). *Perdagangan, Pengusaha Cina, Perilaku Pasar*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita
- Ramlawati., Harahap, R. D., Daulay, M.T., Tarigan, W.J., Wahyoedi, S., & Kardini. (2022). *Pengantar Ekonomi*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri. Tersedia dari <http://repository.uinsu.ac.id>.

- Wahid, Abdul. 2009. *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Widjaja, I. & Swasono, M. 1985. *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Yang, Twang Peck. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940 – 1950*. Yogyakarta: Penerbit Niagara.
- Zhou, Taomo. 2019. *Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Jakarta: Buku Kompas. Tersedia dari iPusnas.
- Darini, R. (2008). “Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, 1900-1945”. *MOZAIK*, (Vol. 3, No. 1, 2008).
- Handinoto. (1999). “Lingkungan ‘Pecinan’ Dalam Tata Ruang Kota Di Jawa Pada Masa Kolonial”. 20–29. <http://puslit.petra.ac.id/journals/architecture/>.
- Husniyati, Lilik. (2021). “Hubungan Sosial Antara Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Bumiputera di Kota Lasem dari Pra Kemerdekaan (1740-1743), Orde Lama dan Orde Baru”. (Skripsi, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, IAIN Salatiga).
- Ittihadiyah, Himayatul. (2012). “Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950): Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah ‘Negeragung’ Kasultanan Mataram Islam”. *Ejournal UIN SuKa*, (Vol. 13, No. 2, 2012).
- Krisdianti, Lusi. (2019). “Etos Kerja Keluarga Liem Siau Lam dalam Pengembangan Usaha Perdagangan Hasil Bumi di Gombang Tahun 1920-1942”. (Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang).
- Musianto, L. S. (2003). “Peran Orang Tionghoa dalam Perdagangan dan Hidup Perekonomian dalam Masyarakat”. (Universitas Kristen Petra). Tersedia dari <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>
- Permana, B. (2018). “Etnis Tionghoa pada Masa Orde Baru: Studi atas Tragedi Kemanusiaan Etnis Tionghoa di Jakarta (1998)”. (Skripsi, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah).
- Sasaki, Hiroaki. (2022). “Special Feature: Economic Dynamics (Growth, Capital, Labor, Technology, and Money)”. *Evolutionary and Institutional Economics Review*. Tersedia dari <https://link.springer.com/>.
- Utomo, Cahyo Adi. (2010). “Peran Etnis Cina dalam Perdagangan di Surakarta pada Tahun 1959-1998”. (Skripsi, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret).
- Wahyudi, Haryono. (2004). “Kota Gombang Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Kebumen”. (Tesis, Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro).
- Wibowo, G. A. (2017). “Ekonomi Etnis Cina Di Surakarta Selama Orde Baru”. In *Jurnal Seuneubok Lada* (Vol. 4, Issue 1).
- Wibowo, P. (2010). “Tionghoa Dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis Tentang Posisi Dan Identitas”. 640–657.
- Hindarto, Teguh. 2015. “Daya Tarik Gombang Bagi Etnis Tionghoa di Era Kolonial”. Tersedia dari (<https://historyandlegacy-kebumen.blogspot.com>). Diakses pada 3 Mei 2025.
- Lan, Thung Ju. 2004. *Perjalanan Tionghoa dalam Sosial dan Politik Indonesia Jilid III*. Jakarta: Tempo Publishing. Tersedia dari iPusnas.
- Tempo. 2004. *Perjalanan Tionghoa dalam Sosial dan Politik Indonesia Jilid I*. Jakarta: Tempo Publishing. Tersedia dari iPusnas.
- Wei, Lin Che. 2004. *Perjalanan Tionghoa dalam Sosial dan Politik Indonesia Jilid II*. Jakarta: Tempo Publishing. Tersedia dari iPusnas.
- Winarta, Frans. 2004. *Perjalanan Tionghoa dalam Sosial dan Politik Indonesia Jilid III*. Jakarta: Tempo Publishing. Tersedia dari iPusnas.